



Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD

Istiti Rohmawati^{1*}, Dadang Kuswana¹, Enok Risdayah²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : istirahma36@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan ekonomi masyarakat melalui program zakat community development (ZCD) membutuhkan peran stakeholder yang maksimal sebagai strategi dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian diatas untuk mengetahui peran stakeholder, strategi, dan panduan sistem yang dibuat oleh Baznas Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, serta metode mactor yang menganalisis aktor dan faktor dalam indikator kesuksesan pemberdayaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran stakeholder dalam melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD) sangat efektif, dengan meningkatnya daya jual, meningkatnya daya produksi, dan meningkatnya pendapatan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Strategi kegiatan dalam memberdayakan pelaku usaha atau penerima manfaat BAZNAS yaitu sebagai berikut: a) edukasi wirausaha; b) sarana usaha c) modal usaha; d) perbaikan peralatan usaha; e) advokasi legalitas; penguatan produk; f) penguatan jaringan marketing. Program pedoman system yang dibuat Baznas dengan membuat wirausaha di berbagai bidang, yaitu wirausaha mandiri bidang peternakan, pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan olahan makanan.

Kata Kunci : Peran Stakeholder; Pemberdayaan; Mactor

ABSTRACT

Improving the community's economy through the zakat community development (ZCD) program requires the maximum role of stakeholders as a strategy in achieving goals. The purpose of the study above is to determine the role of stakeholders, strategies and system guidelines made by the Baznas of West Java Province in improving the economy of the people in West Java, especially in the city of Bandung, as well as the mactor method that analyzes actors and factors in indicators of empowerment success. The research uses qualitative descriptive methods. The results showed

that the role of stakeholders in implementing the Zakat Community Development (ZCD) program is very effective, with increasing selling power, increasing production power, and increasing income to support community welfare. The strategy of activities in empowering business actors or beneficiaries of BAZNAS is as follows: a) entrepreneurial education; b) business facilities c) business capital; d) repair of business equipment; e) legality advocacy; product reinforcement; f) strengthening network marketing. The system guideline program created by Baznas by making entrepreneurs in the fields of: independent entrepreneurs in the fields of animal husbandry, agriculture, fisheries, handicrafts, and processed food.

Keywords : *Stakeholder Role; Empowerment; Mactor*

PENDAHULUAN

Perusahaan dan organisasi tidak semata memiliki kepentingan pada pemegang saham aja, tetapi juga terhadap pihak lain yang mempunyai berkepentingan dengan keberadaan para pemangku kepentingan organisasi. Pemangku kepentingan tidak terbatas pada komunitas individu atau kelompok sekitar organisasi saja, namun terdapat komunitas yang jauh lebih luas seperti pemerintah, investor, elit politik dan sosial untuk membangun kerjasama. Bentuk kerjasama antara organisasi dan pemangku kepentingan terjalin oleh kemitraan untuk membuka peluang dan pengembangan bersama. Konsep kedewasaan ditunjukkan oleh perusahaan dengan memaksimalkan program kerja dalam kerangka pemangku kepentingan, secara struktural dengan bentuk representasi masyarakat bidang ekonomi.

Kegiatan bisnis di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Beberapa tahun terakhir situasi perekonomian di Indonesia tidak stabil, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mendasari ketidakstabilan ekonomi saat ini. Berbagai permasalahan sosial-ekonomi di Indonesia diakibatkan dari ketidakstabilan ekonomi tentu menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Ekonomi kerakyatan dianggap kegiatan ekonomi melalui usaha memenuhi kebutuhan hidup sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ekonomi kerakyatan merupakan model pemberdayaan yang terlatih dan terbimbing, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk dapat merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan program pembangunan. Penguatan ekonomi kerakyatan mendorong masyarakat untuk menjadi wirausahawan, untuk meningkatkan taraf hidup. Pelatihan menjadi kegiatan penting untuk meningkatkan kualitas dan keahlian individu (Utami, 2010: 28).

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan hidup. Kegiatan pemberdayaan secara mendasar dilihat dari keadaan

Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD masyarakat, kemudian mengangkat permasalahan untuk diselesaikan sebagai esensi (Mukarom & Muhibudin, 2015:80).

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan dalam kelangsungan organisasi. Stakeholder individu, organisasi atau kelompok memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam tertentu (Brown et al, 2001). Kelompok kepentingan dikenal sebagai pemegang posisi yang kuat dalam menentukan hasil proses politik, kemudian untuk penelitian pemangku kepentingan membantu dalam mengidentifikasi dan mempengaruhi kebijakan.

Analisis stakeholder dalam penelitian ini, mengkaji pemangku kepentingan terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Kehadiran stakeholder bertujuan untuk mengembangkan visi strategis orang-orang dan organisasi terlibat, dengan mempertimbangkan hubungan dan perbedaan antara pemangku kepentingan atau isu-isu utama dari setiap variabel modal sosial dan metode analisis mactor yang diharapkan membawa masyarakat berdaya khususnya dibidang ekonomi.

Metode analisis interaksi antar aktor adalah metode MACTOR (Matrix of Alliance and Conflict: A Tactics, Objectives, and Recommendations), merupakan metode yang mengevaluasi hubungan penting antara aktor dan antar faktor sebagai poin masing-masing. Konvergensi dan divergensi dengan tujuan yang dicapai. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Kepala LPEM Baznas Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

“Saat ini keadaan aktor dan faktor dalam binaan lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik Baznas Provinsi Jawa Barat masih kurang nya kecakapan pendamping sebagai aktor perubahan dalam dalam berkomunikasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu kurang nya kemampuan analisis sosial pendamping, kecakapan pendamping dalam menyampaikan materi, ada juga latar belakang pendidikan pendamping , kemampuan pendampingan , dan kemampuan pemetaan masalah serta faktor yang mempengaruhinya yaitu kebijakan pemerintah setempat, dukungan dari Stakeholder yang ada, masyarakat, dan adat istiadat” (Kepala LPEM Baznas Jabar, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara Kepala LPEM Baznas Provinsi Jawa Barat bahwa analisis mactor ini sejalan dengan model pengembangan masyarakat islam, khususnya menganalisis faktor-faktor dan aktor-aktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan ini mungkin bukan karena faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya saja, tetapi mungkin terkait dengan aktor-aktor yang disimpan di suatu daerah. Pengembangan masyarakat berbicara kepada aktor-aktor baru yang menjadi aktor-aktor perubahan. Para pelaku ini merupakan pendamping yang

didukung oleh LPEM Baznas Jawa Barat.

Metode analisis faktor yang dipimpin oleh LPEM Baznas Jabar, telah ada sejak tahun 2019 untuk menganalisis pasca program lembaga. Pengamatan awal menunjukkan bahwa aktor dan aktris di bawah bimbingan Baznas, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) masih kekurangan keterampilan asisten sebagai agen komunikasi dan sosialisasi perubahan. Disarankan keterbukaan informasi ada pada proses pemberdayaan tersebut. Selain itu, kurangnya keterampilan analisis sosial aktor, keterampilan aktor untuk memberikan dokumentasi, pelatihan mentor, keterampilan pendampingan, dan keterampilan pemetaan masalah. Faktor yang mempengaruhi seperti kebijakan pemerintah daerah, dukungan stakeholder yang ada, masyarakat, dan adat istiadat.

Penelitian terdahulu oleh Nurhikmah (2017) dengan judul "Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Bengo", menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan pendidikan bervariasi sesuai dengan jenis pemangku kepentingan, dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, termasuk lembaga pendidikan, instansi pemerintah, masyarakat, individu, organisasi masyarakat, organisasi hukum dan kelompok masyarakat. Menurut tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan, mereka dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut: BPTH), Peserta: Badan Narkotika Nasional (BNN), Sektor Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penyelenggara Lomba: Kehutanan, Pengunjung, Masyarakat/Petani di Sulawesi Selatan.

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel pada penelitian terdahulu mengkaji tentang analisis pemangku kepentingan pengelolaan hutan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait variabel peran stakeholder dalam pemberdayaan ekonomi melalui metode analisis mactor. Fokus penelitian juga memiliki perbedaan bahwa penelitian terdahulu fokus terhadap pengelolaan hutan di kawasan hutan pendidikan Bengo Unhas, sedangkan penelitian yang diangkat berfokus terhadap program Zakat Community Development dengan locus di Baznas Jawa Barat.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai "Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor", dapat disimpulkan pertanyaan penelitian yaitu: a) bagaimana strategi dan pedoman sistem yang dibuat oleh BAZNAS Jabar untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di suatu daerah; b) apa saja indikator keberhasilan aktor dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di suatu daerah; c) program apa yang telah dicapai stakeholder setelah menggunakan metode analisis mactor.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk mendeskripsikan, Study Focusing on the Role of Stakeholder in Economic

Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD Empowerment ini memaparkan peran para pemangku kepentingan di LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) Baznas Jawa Barat. Data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan observasi yang dilakukan di Kantor Baznas Provinsi Jawa Barat melalui pengamatan secara empirik yang dilakukan selama 3 bulan oleh peneliti; wawancara dilakukan dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan di LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) Baznas Jawa Barat; kemudian dokumentasi disertai untuk melampirkan setiap proses selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data menggunakan model Miles Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan.

LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori peran, stakeholder, pemberdayaan, ekonomi kerakyatan, zakat dan analisis mactor sebagai landasan teoritis. Menurut Koentjaraningrat (2010) sumber nya menjelaskan bahwa peran berarti perilaku orang yang memilih posisi tertentu, atau konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mengambil posisi atau batan tertentu dalam suatu organisasi atau sistem.

Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) dalam menjalankan hak dan kewajiban serta menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya berarti mengambil peran tertentu. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain. Peran ini berarti mendefinisikan apa yang dilakukan untuk komunitas dan peluang yang diberikan kepadanya. (Soekanto, 2013: 212-213).

Peran adalah ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian integral dari posisi yang dipegangnya, status sosial dikaitkan dengan satu atau lebih. Menempati posisi tertentu memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas mereka terkait dengan posisi itu (Walgito, 2003: 7).

Menurut Bruce J. Cohen (2010) jenis-jenis peran dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: a) peran yang didefinisikan adalah bagaimana masyarakat mengharapakan kita memainkan peran tertentu; b) konflik peran suatu kondisi yang dialami oleh seseorang dengan status yang membutuhkan harapan dan tujuan peran bertentangan; c) kesenjangan peran adalah kinerja peran emosional; d) kegagalan peran adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi peran; e) teladan adalah seseorang yang perilakunya ditiru, atau diikuti; f) sebuah set peran atau ruang lingkup (role set).

Stakeholder itu sendiri terdiri dari dua kata: "stake" dan "holder". Secara umum, kata "stake" dapat dipahami sebagai "kepentingan" dan kata "holder" dapat dipahami sebagai "pemegang". Seperti yang dikatakan sebelumnya,

pemangku kepentingan adalah pemangku kepentingan (Estaswara, 2010:2)

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya *Manajemen Hubungan Masyarakat* menjelaskan bahwa semua pemangku kepentingan adalah kelompok di dalam dan di luar bisnis yang menentukan keberhasilan bisnis. Bias pemangku kepentingan juga berarti bahwa setiap orang di perusahaan mempertaruhkan nyawa mereka (Kasali, 1994: 63). . Freedman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai:

“Setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, sebagai kelompok atau individu yang berpengaruh pada pencapaian tujuan tertentu dan/atau mungkin dipengaruhi oleh mereka” (R.E. Freeman, 1984: 37).

Menurut Freeman (2001) stakeholder atau pemangku kebijakan dibagi ke dalam kategori berdasarkan kekuatan posisi kritis mereka dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu isu meliputi: a) stakeholder utama (primer), memiliki hubungan langsung dengan kebijakan tidak signifikan, namun memiliki pengaruh kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan; b) stakeholders pendukung (tersier) tidak memiliki kaitan penting secara langsung terhadap suatu kebijakan, namun memiliki kepedulian dan suara untuk mempengaruhi keputusan; c) stakeholder kunci memiliki kepentingan secara hukum diberdayakan untuk membuat keputusan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat yang dalam keadaannya saat ini tidak dapat lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memberdayakan dan memberdayakan masyarakat (Kartasasmita, 1995:18).

Pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah pentingnya membangun, memajukan dan meningkatkan kualitas masyarakat. Istilah pengembangan komunitas Muslim juga dikenal sebagai transformasi dan pelembagaan semua aspek ajaran Islam dalam keluarga, kelompok sosial dan kehidupan sosial. Proses atau tahapan perkembangan masyarakat Islam meliputi tahap takwin (pendidikan), tahap tanzim (pelatihan dan latihan) dan tahap studi (kedewasaan dan kemandirian) (Safei, 2020: 17).

Proses pemberdayaan masyarakat perlu melalui tiga tahap: a) Pembentukan kognitif dan perilaku; b) Tahap transformasi keterampilan berupa intuisi dan pengetahuan, kemampuan keterampilan dan pengetahuan; c) Tahap pengembangan kapasitas intelektual dan keterampilan yang memungkinkan munculnya inovasi dan kemandirian (Sulistiyani, 2004: 83).

Menurut Sumodiningrat dalam Graha (2009) konsep pemberdayaan ekonomi meliputi: a) pemberdayaan masyarakat melalui beberapa sisi; b) pemberdayaan ekonomi tidak hanya melalui penyediaan modal terbarukan, tetapi

Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD juga melalui penguatan kelembagaan ekonomi bersama; c) penguatan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional di bidang ekonomi harus dilakukan tanpa menghalangi atau mendiskriminasi ekonomi; d) pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses penguatan pembangunan kuat, modern dan efisien.

Pembangunan ekonomi kerakyatan dapat dibagi menjadi dua kategori: konservatif dan radikal. Pembangunan ekonomi dalam masyarakat konservatif melibatkan orang-orang yang mencari keuntungan dari tatanan ekonomi yang ada, sedangkan pembangunan ekonomi dalam masyarakat radikal melibatkan pembentukan sistem ekonomi alternatif mereka sendiri (Safei, 2020: 17).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melalui empat pendekatan yaitu: a) modal usaha, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan; b) sumber daya manusia memperkuat kapasitas SDM di pedesaan atau perkotaan; c) prasarana dan sarana, yaitu mengembangkan prasarana dan sarana pedesaan serta jaringan pemasaran untuk mempermudah masyarakat memproduksi dan menjual produk ke pasar lokal, regional, nasional, bahkan internasional; d) Penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi, upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat agar proses alih informasi dan teknologi (Sumodiningrat, 2009).

Menurut Prasetyantoko (2008) pembangunan ekonomi yang inklusif memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan, melainkan hanya merupakan sasaran maupun sarana utama dari pembangunan ekonomi, sedangkan tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah meningkatkan kemakmuran bersama semua warga, dan ini umumnya diukur dengan kenaikan tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita.

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam oleh Allah SWT. Dari segi kinerja, zakat merupakan kewajiban sosial terhadap agniya (harta) setelah mencapai minimal harta (nishab) dan satu tahun (memakai). Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik (mereka yang benar-benar berhak menerima zakat) (Rofiq, 2004:259).

Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab zaka-yazku zakaan zakaatan, artinya an-numuw wa az-ziyadah, mengembangkan, memberkati, mengembangkan (Az-Zuhaili, 2011: 729). Jam al-Wasith menjelaskan bahwa pengertian zakat adalah suci, baik, murni dan berkembang (Arifin, 2011: 4).

Mactor (Matriks Aliansi dan Konflik: Taktik, Tujuan, dan Rekomendasi) didasarkan pada pengaruh antar aktor. Metode Mactor mencoba melukiskan gambaran tentang pentingnya dan kemungkinan hasil dari berbagai masalah, serta kemungkinan strategi pemangku kepentingan, hubungan kekuasaan, potensi keterlibatan dan konflik. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem yang

diteliti untuk menciptakan skenario yang lebih baik dan lebih ketat dan memungkinkan untuk menemukan tingkat kepatuhan dengan tujuan yang ditetapkan (Ahmed et al, 2009).

Aktor adalah sebuah lembaga, kelompok, atau individu yang memainkan peran utama dalam suatu sistem (Rees & MacDonell, 2017). Aktor memiliki andil dalam evolusi sistem karena kemampuannya dalam memobilisasi sumber daya dan mempengaruhi hasil sistem secara langsung (Avelino & Wittmayer, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ZCD melalui wirausaha mandiri akan didampingi oleh 20 pendamping lokal dari masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Barat. Pemangku kepentingan atau pendamping (stakeholder baznas) yang berpartisipasi saat ini adalah individu-individu atau orang-orang terpilih yang diseleksi oleh Baznas Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini membutuhkan perhatian, komitmen, dan tindakan bersama baik dari pemerintah dan masyarakat, akademisi, pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dll untuk mengatasi masalah sosial, termasuk kemiskinan.

Penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam proses pemberdayaan berperan sebagai fasilitator. Peran BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai perantara tercermin dalam penyediaan pendanaan usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah ini, para pendamping yang terlibat dalam program ZCD berperan secara keseluruhan. Di sisi lain, Baznas bertindak sebagai inovator dalam proses pendampingan ini karena orang yang memiliki ide untuk membuat program ZCD ini berasal dari ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Beberapa jenis dukungan untuk pendayagunaan zakat, yang dieksplorasi lebih lanjut menggunakan metodologi analisis maktor Program ZCD yaitu keberhasilan aktor dan keberhasilan faktor. Aktor dan faktor tersebut merupakan ukuran aktivitas wirausaha mandiri dan terbagi dalam tiga bidang: peningkatan kapasitas, penyediaan dukungan aset, dan/atau aktivitas dukungan mustahik.

Strategi dan Pedoman Sistem BAZNAS Provinsi Jawa Barat Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi

LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga Program di bawah supervisi Baznas Provinsi Jawa Barat yang bertugas mendorong mustahik untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan para penerimanya sehingga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan (Ilyas, 2018). Mustahik mandiri ditandai dengan kehidupan layak,

Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD kemampuan mengembangkan diri, peningkatan taraf hidup di berbagai bidang serta pemerataan distribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (Hadyantari, 2018).

LPEM membuat program zakat community development yang ditujukan untuk penerima manfaat di Jawa Barat. Zakat community development tersebut membuat usaha usaha mandiri dalam kategori tertentu. Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan kelompok atau komunitas yang berintegrasi pada aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup dan kegiatan kemanusiaan lainnya) yang dimana pembiayaan utamanya dari zakat, donasi, dan sedekah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Shalihin, 2016).

Menurut Lestari & Tikawati (2019) arah dan strategi dari Zakat Community Development (ZCD) ini adalah bagaimana membuat masyarakat untuk memahami, menggali potensi diri untuk mengeluarkan diri dari kemiskinan. Wirausaha mandiri merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup para pengusaha kecil khususnya UMKM melalui program yang dibangun atas kebutuhan penerima manfaat masing-masing. Tujuan dari wirausaha tersebut diantaranya yaitu: a) pengembangan usaha sesuai potensi usaha mustahik; b) pemerataan bantuan untuk mustahik khususnya di wilayah pinggiran.

Adapun strategi kegiatan dalam memberdayakan pelaku usaha atau penerima manfaat menurut Kepala LPEM BAZNAS yaitu sebagai berikut: a) edukasi wirausaha (pelatihan business plan, pelatihan management usaha dan keuangan, pelatihan pemasaran, studi banding); b) sarana usaha (sewa kandang, sewa lahan, sewa kios, pembelian gerobak, pembelian perlengkapan usaha); c) modal usaha (pembelian bibit, pembelian pakan, pembelian bahan baku usaha); d) perbaikan peralatan usaha; e) advokasi legalitas (PIRT, Halal produk, BPOM); penguatan produk (packaging, branding): f) penguatan jaringan marketing.

Peran ZCD dalam pembinaan terhadap usaha masyarakat Kampung Pegat Batumbuk memberikan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan pengolahan ikan, pengemasan terasi, pelatihan mengenai keamanan pangan, pelatihan mengenai branding, dan pelatihan tentang bahan tambahan dalam makanan (Fauzi & Huda, 2020). Penulis menyimpulkan bahwa selain strategi yang disebutkan tersebut terdapat satu strategi yang benar benar dapat memberdayakan ekonomi yang diciptakan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat menawarkan produk frozen food bdg. Produk tersebut mulai dipasarkan oleh stakeholder ke warung - warung dan took-toko yang ada pada setiap kecamatan khususnya di kota Bandung yaitu pada daerah Sukajadi.

Baznas Provinsi Jawa Barat membuat panduan sistem dalam lembaga program yang dinaungi oleh LPEM yaitu membuat wirausaha dalam berbagai

bidang. Ada delapan bidang wirausaha yang dijalankan oleh lembaga program yaitu: a) wirausaha mandiri-bidang peternakan; b) wirausaha mandiri-bidang pertanian; c) wirausaha bidang perikanan; d) wirausaha mandiri-kerajinan tangan. Penyaluran zakat dalam program ZCD membantu mensejahterakan masyarakat dalam aspek ekonomi seperti pengembangan industri rumah tangga, dan pertanian (Susilawati dkk., 2019).

Wirausaha mandiri bidang peternakan merupakan pemberdayaan diperuntukan kepada mustahik dengan potensi peternakan untuk meningkatkan penghasilan mustahik. Pada periode ini penerima manfaat bidang peternakan baru tersebar di 3 Kabupaten, yakni di Kabupaten Sukabumi (Domba), Kabupaten Kuningan (Kelinci), dan Kabupaten Pangandaran (Ayam kampung).

Wirausaha mandiri bidang pertanian merupakan program pemberdayaan diperuntukan kepada mustahik dengan potensi pertanian untuk meningkatkan penghasilan mustahik. Pada periode ini, penerima manfaat bidang pertanian tersebar di 4 Kabupaten, yakni di Kabupaten Garut (Beras Garut Bisnis Hilir), Kabupaten Kuningan (Tani Pokcoy), Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (Tani Gula Aren-Hilir).

Wirausaha mandiri bidang perikanan merupakan pemberdayaan diperuntukan kepada mustahik bidang usaha perikanan untuk menambah penghasilan mustahik. Hingga Bulan Juni 2020, penerima manfaat bidang perikanan tersebar di 8 Kota/ Kabupaten, yakni di Kab. Tasikmalaya (Budidaya Lele), Kab. Indramayu (Budidaya Ikan), Kab. Subang (Budidaya Lele), Kab. Bekasi (Budidaya Ikan), Kota Cimahi (Budidaya Lele), Kab. Majalengka (Budidaya Lele), Kab. Bandung (Ikan Hias Guppy) dan Kab. Bandung Barat (Budidaya Lele).

Wirausaha mandiri handycraf/kerajinan tangan merupakan pemberdayaan diperuntukan kepada mustahik yang menekuni kerajinan tangan, dengan intervensi prasarana usaha, meningkatkan skill dan kualitas produk untuk menambah penghasilan mustahik. Sampai Juni 2020, penerima manfaat tersebar di 2 Kota dan Kabupaten, yakni di Kab. Bandung (Kerajinan Bambu) dan Kota Cimahi (Kaligrafi).

Wirausaha mandiri bidang olahan makanan merupakan pemberdayaan diperuntukan kepada mustahik bidang usaha olahan makanan dengan pendampingan kualitas produk, pengemasan, produksi dan pemasaran untuk menambah penghasilan mustahik. Sampai Juni 2020, 48 penerima manfaat tersebar di 16 Kota/Kabupaten, yakni di Kab. Garut (Keripik Kaca), Kab. Kuningan (Keripik), Kab. Indramayu (Baso), Kab. Bandung Barat (Comring, Noga, Aneka Cemilan), Kab. Majalengka (Opak Ketan), Kota Bandung (Frozen Food dan Soto Bali), Purwakarta (Kunyah instan dan Telur asin), Kota Bekasi (Kentang Goreng), Kab. Cianjur (Olahan Jahe), Kab. Bogor (Keripik Pisang,

Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD bawang), Kab. Subang (Nudget Jamur – Hulu Hilir), Kab. Tasikmalaya (Keripik Singkong), Kab. Karawang (Kerupuk Rajungan), Kab. Sumedang (Produk Baso Sapi) (Baznas Jabar. 2020).

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS. Tugas dan fungsi tersebut sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan (Multifiah, 2009). Prioritas program Baznas sendiri untuk menyelesaikan persoalan pendapatan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi lambat, ketimpangan pendapatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masih belum memadai (Fadila & Marwan, 2020).

Berdasarkan SK Pembentukan Lembaga menjelaskan bahwa LPEM merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) berdasarkan keputusan Ketua Baznas Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS. Melalui berbagai tugas dan fungsi tersebut memberikan solusi sekaligus upaya preventif kepada masyarakat menghadapi persoalan ekonomi , Fathony, 2018).

Visi Baznas menjadi lembaga pendayagunaan zakat yang profesional dan dapat diandalkan melalui bidang agribisnis dan ekonomi kreatif. Adapun misi Baznas yaitu: 1) meningkatkan kualitas, kapabilitas dan produktivitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui penyaluran zakat dibidang pertanian dan peternakan; 2) penguatan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program peternakan desa; 3) menjadi pusat pengembangan literasi dan rujukan (data) serta model pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi mustahik; 4) menjadi salah satu lembaga yang dijadikan percontohan untuk mensejahterakan kehidupan dhuafa (mustahik).

Indikator Keberhasilan Aktor Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Stakeholder atau pendamping binaan Baznas Jabar tersebut menerapkan langkah-langkah keberhasilan standar pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi dengan pengorganisasian kegiatan-kegiatan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif (Aini & Mundir, 2020). Pada tahap perencanaan, para pemangku kepentingan ini telah menetapkan legalitas yang ketat dan dibantu oleh Baznas Jawa Barat dalam perizinan makanan, khususnya makanan beku. Implementasi program ini terlihat dari meningkatkannya kemandirian ekonomi masyarakat (Khasanah & Suryaningsih, 2019).

“Fasilitator terlatih secara mandiri dan memiliki keterampilan dasar sebagai pelaku usaha. Selain itu, pendamping ini mengajak kelompok untuk menjual produknya di acara-acara seperti bazar dan kegiatan lainnya. Produk-produk yang dibuat oleh pendamping dan kelompok pendukungnya antara lain chicken cutlets, nugget, chicken egg roll, ekkado, pangsit dan dim sum”. (Wawancara, Jumat, 24 Juni 2022)

Pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses dimana masyarakat bekerja dengan kelompok formal dan informal untuk melakukan pencarian masalah, perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan rencana umum. Pemberdayaan lahir sebagai antitesis dari model pembangunan dan industrialisasi yang tidak menguntungkan rakyat banyak. (Risdayah, dkk, 2018:12). Pemberdayaan memiliki dua fungsi: pertama sebagai instrumen membangun kemandirian ekonomi, yang dilakukan melalui pembekalan keterampilan berbasis pengembangan hobi, kedua pemberdayaan menjadi instrumen dakwah persuasif (Mantik et al, 2021).

Implementasi, program ZCD dapat meningkatkan pendapatan mustahik untuk mencapai keberdayaan dalam membentuk masyarakat sejahtera dan mandiri. Sedangkan pada aspek supervisi pada program ZCD masih perlu ditingkatkan agar supervisi dilakukan kepada pembimbing dan pembina mustahik secara berkala dan berkesinambungan (Toni, 2020). Selain itu kesadaran, pengetahuan, dan kepercayaan dirasa penting untuk diperhatikan oleh BAZNAS maupun stakeholders (Sarvianto, 2021).

Tahap perencanaan terlihat dari Memberdayakan Bisnis Produk BDG Frozen Foods dengan Program Zakat Community Development (ZCD) diharapkan para pelaku ekonomi tersebut lebih mandiri dan mengembangkan sikap yang Amanah dan kuat (Yudhira, 2020). Adapun tahapan indikator stakeholder dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi adalah: a) tahap perencanaan; b) tahap pelaksanaan; c) tahap evaluasi.

Hasil penelitian didapatkan temuan bahwa pada tahap perencanaan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu tahap pembuatan legalitas dan tahap pembentukan kelompok. Proses perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu program yang diwadahkan oleh Lembaga Zakat (Yazid, 2017). Hal tersebut menjadi peranan penting dalam proses pemberdayaan. Tahap legalisasi produk BDG makanan beku melibatkan kedua belah pihak yaitu stakeholder dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, serta didukung oleh badan program ekonomi yaitu Lembaga Program Ekonomi Mustahik. Legalitas ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam membeli produk dan makanan, seperti makanan beku olahan dan makanan beku yang disebut Frozen Food BDG. Setelah legalitas itu selesai, kelompok itu didirikan di kecamatan Sukajadi, kota Bandung. Dua kelurahan yang perlu diberi izin yaitu kelurahan Cipedes dan kelurahan Pasteur. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang sesuai dengan petunjuk dan bimbingan dari sistem LPEM. Proses perencanaan yang mengidentifikasi indikator keberhasilan aktor, yaitu pertama pembuatan legalitas resmi untuk produk, yang kedua ialah pembentukan kelompok pelaku usaha Frozeen Food.

Tahap pelaksanaan bertujuan untuk menyelesaikan seluruh program dan rencana yang telah dipersiapkan oleh stakeholder atau pendamping LPEM Baznas Provinsi Jawa Barat. Pada intinya, pemberdayaan berarti menyiapkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Dalam pemberdayaan melalui program zakat community development, sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian telah dipenuhi melalui kegiatan penyediaan modal, pendidikan atau arahan, dan pelatihan dalam bentuk seminar maupun workshop, bantuan sarana dan prasarana yang menunjang proses produksi dan juga penguatan kemitraan.

Kegiatan dalam tahap pelaksanaan belum melibatkan seluruh masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini hanya melibatkan orang-orang dalam kapasitas yang terbatas. Kelompok yang termasuk dalam program Zakat Community Development ini memulai pelaksanaan dengan manajemen pemasaran barang dan uang, mulai dari perincian barang disebarkan atau dijualbelikan hingga pembukuan uang. Selama proses pelaksanaan terbangunnya jiwa-jiwa usaha dalam setiap dirinya masing-masing serta partisipasi masyarakat sudah lebih baik.

Tahap Evaluasi Tahap evaluasi dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di dalam masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Diawali dari pengawasan, monitoring, dan bertanggung jawab atas peningkatan akuntabilitas pihak-pihak pengelola zakat, dalam konteks ini tentu pengumpulan zakat turut termasuk (Syafiq, 2019). Mengevaluasi program pemberdayaan Zakat Community Development (ZCD) diwujudkan melalui diupayakannya kelompok binaan LPEM agar menjadi program yang berkelanjutan.

Program dan Hasil oleh Stakeholder Setelah Menggunakan Metode Analisis Mactor

Keberadaan program kerja stakeholder dinilai penting karena akan berdampak pada semangat kerja yang timbul dari binaan kelompok LPEM BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Stakeholder merupakan aktor yang memiliki peranan penting dalam mengorganisasikan program kerja BAZNAS (Dewi, 2017). Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh pendamping yaitu:

“Pada dasarnya seluruh anggota yang terlibat dalam kelompok usaha di kecamatan Sukajadi membutuhkan sarana dan prasarana penunjang kerja mereka, baik sarana dan prasarana secara fisik atau bisa dikatakan modal maupun sarana dan prasarana secara kemudahan dalam pelayanan kebutuhan mustahik.” (wawancara, Jumat 24-06-2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program kerja pendamping berhasil meningkatkan perekonomian mustahik karena adanya bantuan dari pihak lembaga terkait yaitu Baznas Provinsi Jawa Barat. BAZNAS secara umum menitikberatkan program yang berbasis pemberdayaan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat (Prahes & Putri, 2018). Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat khususnya lembaga program yang menaungi wadah perekonomian masyarakat (Khatimah & Nurhadi, 2021). Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik sudah melaksanakan program sesuai dengan tupoksinya dan berjalan dengan baik, maka hal ini dapat menunjang keberlangsungan aktivitas kerja baznas dengan efektif dan efisien.

Hasil program yang telah dicapai stakeholder setelah menggunakan metode analisis Mactor yaitu: aktor yang menunjang keberhasilan program dan faktor yang menunjang keberhasilan program. Faktor tersebut meliputi keberhasilan produksi dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Mursyidah, 2019). Adapun penjelasannya secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

Aktor yang menunjang keberhasilan program, menunjukkan bahwa stakeholder atau pendamping dalam kelompok Binaan Baznas diseleksi melalui tahap-tahap recruitment oleh Baznas Jawa Barat. Dari puluhan yang mendaftar hanya satu orang yang mendampingi Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Aktor-aktor inilah yang terus berusaha meningkatkan pemulihan ekonomi di Kecamatan Sukajadi lebih tepatnya pada Kelurahan Cipedes dan Kelurahan Pasteur. Aktor tersebut terus memperbaiki setiap kekurangan karena saat program ini dijalankan terbentur dengan program Dinas Kesehatan yang inti dari tujuannya adalah mengharuskan seluruh UMKM produk makanan freezer mempunyai legalitas atau BPOM dan sertifikat halal. Maka aktor (Stakeholder Binaan Baznas Provinsi Jawa Barat) ini terus berputar memikirkan nasibnya sebagai pendamping dalam menahkodai usaha yang hanya diberi Logo BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Dengan semakin banyak nya pemasaran barang membuat tingkat produksi frozen food meningkat. Lambat laun kelompok binaan yang dinahkodai oleh aktor tersebut bertambah anggota satu persatu dari setiap minnggu ke minggunya. Adapun nama anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok Kota Bandung dari hasil wawancara dengan aktor atau pendamping pada hari Jumat 26-06-2022 bersama Bapak Doni yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Nama Kelompok Binaan

Kelompok Frozen Food	Alamat
Anih Herawati	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Tuti Kurnaeti	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Rosmi Hayati	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Nurasni	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Dian Yuliana	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Yani Suryani	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Sri Surmaryati	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Aniyati	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Rani Ratnasari	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Iis Siti Nurjanah	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung

Sumber: Buku Rekapitulasi Pendamping

Selain kelompok tersebut, ada pula kelompok kedua yang dibentuk oleh pendamping atas skema atau panduan sistem yang di buat oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik yaitu Bernama Nineung Food BDG. Kelompok tersebut yaitu:

Tabel 2 Daftar Nama Kelompok Binaan

Kelompok Frozen Food	Alamat
Teni Ambarwani	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Irmalasari	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Wini Oktaniani	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Dede Haryati	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Lina	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Rosmini	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung

Kelompok Frozen Food	Alamat
Herni Gustiani	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Teti Rohaeta	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Sumarni	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung
Eva Komalasari	Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung

Sumber: Buku Rekapitulasi Pendamping

Berdasarkan tabel 2, anggota kelompok tersebut ada yang sudah mandiri dan adapula yang belum mandiri. Anggota kelompok yang sudah mandiri yaitu Teni Ambarwani dan Sumarni. Adapun kelompok yang belum bisa dimandirikan yaitu kelompok frozen food bdg karena saat ini seluruh lembaga program yang menangani permasalahan ekonomi ada pemberhentian program sehingga LPEM (Lembaga Program Ekonomi Mustahik) dihapus dan digantikan oleh lembaga lain. Adanya pergantian pimpinan di Baznas Provinsi Jawa Barat maka pemberhentian kerja sama antara Baznas Provinsi Jawa Barat dengan aktor atau stakeholder ini tidak dilanjutkan karena tidak ada dukungan dari Baznas Provinsi Jawa Barat. Tetapi aktor atau stakeholder saat ini tidak patah semangat, dikarenakan aktor ini diajak Kerjasama oleh pihak lain yaitu YBM PLN (Yayasan Baitul Maal PLN) sehingga usaha usaha perekonomian tetap berjalan dengan baik.

Faktor yang menunjang keberhasilan program selain para pemangku kepentingan yang telah mensukseskan Program *Zakat Community Development*. Berbagai kelompok dan lembaga lainnya merupakan faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Beberapa lembaga yang melatarbelakangi keberhasilan tersebut, antara lain dukungan dari pemerintah daerah, RT, RW, dan camat, serta pemasaran dan penjualan barang di kantor Posyandu.

Kebijakan pemangku kepentingan khusus yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional, yang sering dikenal dengan BAZNAS. Baznas tidak hanya digunakan untuk upaya perlindungan sosial tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Kebijakan program pemberdayaan sendiri memiliki fokus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Farida, 2019). BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa program unggulan dalam misinya memberdayakan masyarakat. Salah satu inovasinya adalah terciptanya program kreatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu Program Zakat Community Development (ZCD) yang didirikan oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM).

Stakeholder sejauh ini merupakan satu-satunya yang didanai oleh Zakat, Infaq dan Sadaqah melalui Baznas di Jawa Barat. Oleh karena itu, Program ZCD

Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD yang didirikan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik tidak hanya menyangkut pembiayaan dalam bentuk modal usaha, tetapi juga kegiatan pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan sarana dan prasarana, penguatan kemitraan dan pembentukan kelompok usaha. Monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan, program ZCD oleh semua pihak binaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang berperan dalam Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan program alternatif seperti Zakat Community Development, yang didirikan oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dan berfokus pada pembangunan ekonomi, merupakan cara yang efektif. Dengan berkembangnya usaha produk frozen food bdg (makanan beku) maka akan ada investasi dan pengembangan dari berbagai sektor untuk menampung tenaga kerja yang banyak.. Program ZCD menarik karena telah terbukti memajukan masyarakat melalui pendanaan perusahaan dari Zakat, Infak dan sedekah. Selain membawa dampak positif untuk perusahaan, program ini membawa keuntungan untuk anggota stakeholder itu sendiri. Dengan bergabungnya mereka ke dalam kelompok menambah hasil pendapatan di setiap harinya. Indeks kemiskinan bisa sedikit teratasi dengan tersebarnya usaha mikro kecil yang sukses dan berjalan.

PENUTUP

Program ZCD melalui wirausaha mandiri akan didampingi oleh 20 pendamping lokal dari masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Barat. Pemangku kepentingan atau pendamping yang berpartisipasi saat ini adalah individu-individu terpilih yang diseleksi oleh Baznas, Jawa Barat. Para pendamping yang terlibat dalam program ZCD berperan secara keseluruhan. Di sisi lain, Baznas bertindak sebagai inovator dalam proses pendampingan ini karena orang yang memiliki ide untuk membuat program ZCD. Peran stakeholder dalam pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan metode analisis Mactor maka dapat disimpulkan yaitu:

Strategi dan pedoman sistem yang dilakukan oleh stakeholder atau amil Baznas Provinsi Jawa Barat, dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi di masyarakat, khususnya daerah binaan kota Bandung yaitu kecamatan Sukajadi, sangat efektif terbukti dengan meningkatnya daya jual, meningkatnya daya produksi, meningkatnya pendapatan, sehingga dengan proses seperti ini dapat kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Indikator kesuksesan aktor dalam peningkatan ekonomi yang diterapkan Baznas Provinsi Jawa Barat sudah sejalan dengan konsep pemberdayaan. Hal ini karena, didukung oleh strategi yang efektif yaitu dengan menjalankan program zakat community development, sehingga dapat dengan baik mengembangkan dan memanfaatkan sumber dana yang diterima. Baznas Provinsi Jawa Barat menjalankan program-program wirausaha mandiri melalui bidang pendistribusian

dan pendayagunaan secara optimal.

Program yang telah dicapai stakeholder setelah adanya metode analisis MACTOR yang diterapkan di Baznas Provinsi Jawa Barat yaitu terbentuknya wirausaha mandiri. Metode analisis tersebut merupakan metode yang tepat dalam menganalisis aktor dan faktor melalui kegiatan wirausaha mandiri frozen food bdg, sehingga dapat berpengaruh dalam kesuksesan pemberdayaan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat perbandingan keberhasilan selama satu tahun.

Beberapa jenis dukungan untuk pendayagunaan zakat, yang dieksplorasi lebih lanjut menggunakan metodologi analisis maktor Program ZCD yaitu keberhasilan aktor dan keberhasilan faktor. Aktor dan faktor tersebut merupakan ukuran aktivitas wirausaha mandiri dan terbagi dalam tiga bidang: peningkatan kapasitas, penyediaan dukungan aset, dan/atau aktivitas dukungan mustahik. Dalam tahap pengembangan kapasitas memiliki tiga faktor yaitu : a) individual dan kelembagaan lokal; b) nilai sikap islami, pengetahuan dan keterampilan; c) keterampilan manajemen, keterampilan kepemimpinan, kepeloporan, kemampuan memobilisasi sumber daya Setelah tahap pengembangan, indikator selanjutnya adalah pemberian bantuan aset.

Pemberian bantuan aset ini terbagi dalam beberapa faktor yaitu: a) uang dan/atau barang diterima langsung oleh Mustahik; b) aset barang Bersama yang manfaatnya untuk mustahik; c) pelayanan jasa yang manfaatnya untuk mustahik. Faktor terakhir dalam kegiatan pendayagunaan zakat pada program ZCD melalui Wirausaha Mandiri yaitu tahap pendampingan mustahik. Adapun indikatornya ialah: a) pendampingan mustahik diberikan dalam bentuk pembinaan, edukasi, pendidikan, penyuluhan dan/atau lobi: c) pertemuan langsung dan tidak langsung: d) distribusi offline.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2016). *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 3 No. 1 (2016): 18-39, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>.
- Ahmed, M. E. ; Shehata, E. I. ; Ammou, F. F. A. ; Khalifa, E. I. ; El-Zolaky, O. A.. (2009). Consumer Perception and Attitude T oward Credit Card Usage : A Study of Pakistani Consumer. *Journal of Comparative Intenational Management*. Vol. 12 (1).
- Aini, N., & Mundir, A. (2020). *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan*. Media: Jurnal Ekonomi Islam. 12(1), 96-108.
- Arifin, A. (2011). *Zakat, Infaq Dan Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaannya)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor Program ZCD
- Avelino, F., & Wittmayer, J. M. (2016). Shifting power relations in sustainability transitions: A multi-actor perspective. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 18(5), 628–649. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1112259>
- Az -Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Azy, Yazid. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 173-199.
- Brown, K. F., Tompkins, E. L., & Adger, W. N. (2001). Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-Making. University of East Anglia
- Brown, K. F., Tompkins, E. L., & Adger, W. N. (2001). Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-Making. University of East Anglia.
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992, Hal 25
- Dewi. (2017). *Pemberdayaan Untuk Kesejahteraan Mustahik di Lazîs NU Kabupaten Banyumas*. *Jurnal: Pemberdayan JPA*, 18(2), 257–289.
- Estaswara, H. (2010). *Stakeholder Relation*. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120–133.
- Farida, A. (2019). *Strategi Pemberdayaan Mustahik di Lazîsmu Masjid Mujabidin Bandung*. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 17(2), 532–554.
- Fathony, A. (2018). *Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial*. *Jurnal Hakam*, Vol 2(1).
- Fauzi, Farid & Huda, Miftahul. (2020). Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau. *Jurnal Ummul*. 2(1).
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management : A Stakeholder Approach*. Boston: Fitman.
- Graha, A. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi (Universitas Kanjuruhan, Malang).
- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 1–22.
- Ilyas, R. (2018). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 323.
- Kartasmita, G. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bandung.
- Kasali, R. (1994). *Manajemen Public Relation: konsep dan aplikasinya di*

- Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Khasanah, I., & Suryaningsih, S. A. (2019). *Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Khatimah, H., & Nurhadi. (2021). *Pemberdayaan Mustabiq BAZNAS Kabupaten Sukabumi Melalui Program Bangkit Usaha Mikro Berbasis Masjid Desa Peradaban Zakat (BUMI DPZ)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(1), 23-33
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, E. D., & Tikawati. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>.
- Mantik, Aliyah et al. (2021). Creative Economy-Based Da'wah Approach: in the Deaf Community in Lampung. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. 15(1), 17-42.
- Mukarom, Z., dan Muhibudin. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Multifiah. (2009). *Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*. 1(2)
- Mursyidah, A. (2019). *Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustabik Produktif*. *Islamic Economic Journal*, 5(1), 117–142.
- Nurhikmah, L. (2017). Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Unhas, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanudin.
- Prahest, D. D., & Putri, P. P. (2018). *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Ilmu Dakwah*: *Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141–160
- Prasetyantoko, A. (2008). *Corporate Governance; Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rafiq, A. (2004). *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rees, G. H., & MacDonell, S. (2017). Data gathering for actor analyses: A research note on the collection and aggregation of individual respondent data for MACTOR. *Studies Research Journal: Trends and Strategies*, 9(1), 115–137. <https://doi.org/10.24023/FutureJournal/21755825/2017.v9i1.256>
- Risdayah.E. (2018). *Students Economic Empowerment Trought the Public Sphere* : International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018).
- Rofiq A, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259.
- Safei, A. (2020). *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat*. Bandung:

- Sarvianto, D.F. (2021). *Analisa Maraknya Pemanfaat Platform Dalam Pengumpulan Zakat Melalui Perspektif Strukturak Ala Giddens (Tinjauan Sosiologi)*. Al-mutharaha: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol, 18(1).
- Shalihin, R. (2016). Zakat Community Development (Zcd) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 16(2).
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susilawati, N., Sunarto, A., & Rohimin, R. (2019). Zakat Community Development Program Through Zakat Village Index Approach. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(2), 191–202.
- Toni, H. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Bina Lingkungan Zakat di Provinsi Bengkulu. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletoc Studies*. Vol, 14(2), 317-340.
- Utami, M. (1992). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Walgito, Bimo. (2003). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 89–102.
- Yudhira, A. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*. *Jurnal Ilmiah Akutansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(1), 1–15.

